

KONSEP DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

INTAN FITRI MEUTIA, PH.D.

KEBIJAKAN PUBLIK &
APLIKASI

Bandarlampung,
Sabtu, 11 September 2021

DAFTAR LITERATUR

Adrian Kay, The Dynamics of Public Policy. Theory and Evidence, 2006

Thomas Dye, Understanding Public Policy, 1972.

Michael Howlett and M. Ramesh, Studying Public Policy, 2003.

Hal Colebatch, Policy, 1998.

dll



Beberapa istilah “Publik”

Kepentingan Publik (*public interest*)

Opini publik (*public opinion*)

Barang-barang publik (*public goods*)

Hukum publik (*public law*)

Sektor publik (*public sector*)

Akuntabilitas Publik (*public accountability*)

Toilet publik/umum (*public toilets*) (?)



“Public-Private” dan “Policy”

Publik (*res publica*) dan private (*res priva*) merupakan dua konsep abadi yang selalu diperdebatkan

Relasi ruang publik dan ruang privat mendominasi teori kontemporer tentang kebijakan publik, bagaimana memuaskan kepentingan individual sekaligus meningkatkan kesejahteraan publik

Bridge antara keduanya menurut *Habermas* adalah pasar (*market*), menjawab bagaimana intervensi negara atas barang publik.

DEFINISI KEBIJAKAN

“Anything a government chooses to do or not to do” (Dye 1972)

“Policy expresses a general set of objectives or a desired state of affairs” (Kay, 2006)

‘Public policy is a choice made by a government to undertake some course of action.’ (Howlett and Ramesh’ s, 2003)



POLICY IS ABOUT CHOICE:

the choice of objectives;

the choice of reasons for (in)action;

the choice of policy instruments;

***The choice of how to respond to the
consequences of policy outputs***

(Adrian Kay, 2006)

MAKNA KATA KEBIJAKAN PUBLIK

- Policy as a label for a field of activity (foreign policy etc);*
- Policy as an expression of general purpose or the intended path towards a desired state of affairs;*
- Policy as a specific proposal;*
- Policy as a decision of government;*
- Policy as a formal authorization (for example, legislation);*
- Policy as a programm of activity;*
- Policy as outputs or what governments actually deliver,*
- Policy as outcomes or what is actually achieved*

Hogwood and Gunn (1984, pp. 11–19)

DEFINISI KEBIJAKAN

Kebijakan adalah upaya untuk mendefinisikan dan menyusun **basis rasional untuk memilih** apakah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (*to do or not to do*) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.

Kebijakan adalah Intervensi Negara/Pemerintah yang bersifat **pengaturan** dalam ruang lingkup kegiatan publik untuk mewujudkan tujuan-tujuan umum (*public interest and social welfare*)

SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CICLE)

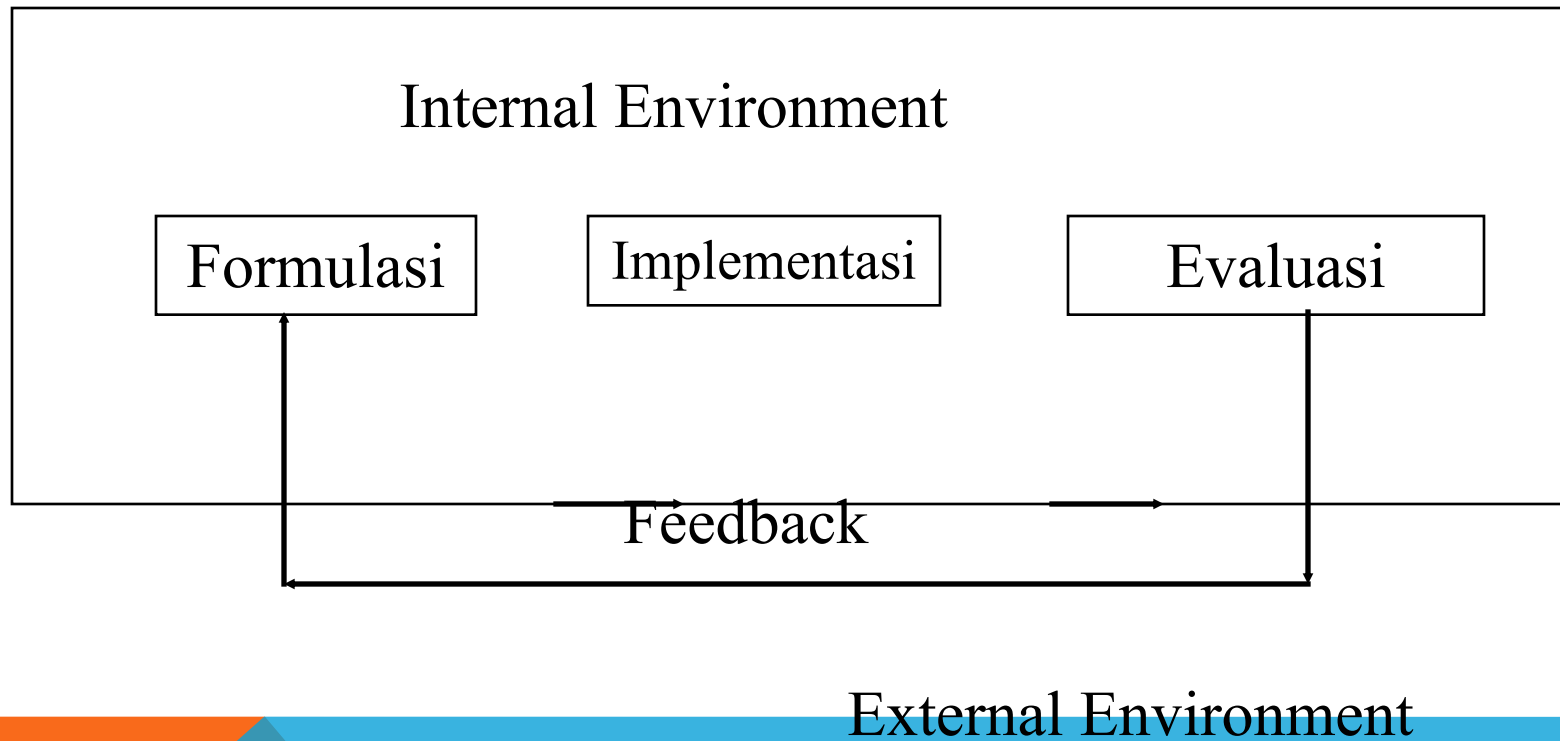
The policy cycle imagines the policy process as an *endless cycle of policy decisions, implementation and performance assessment* (Colebatch (1998)

A similar cycle but with more steps:

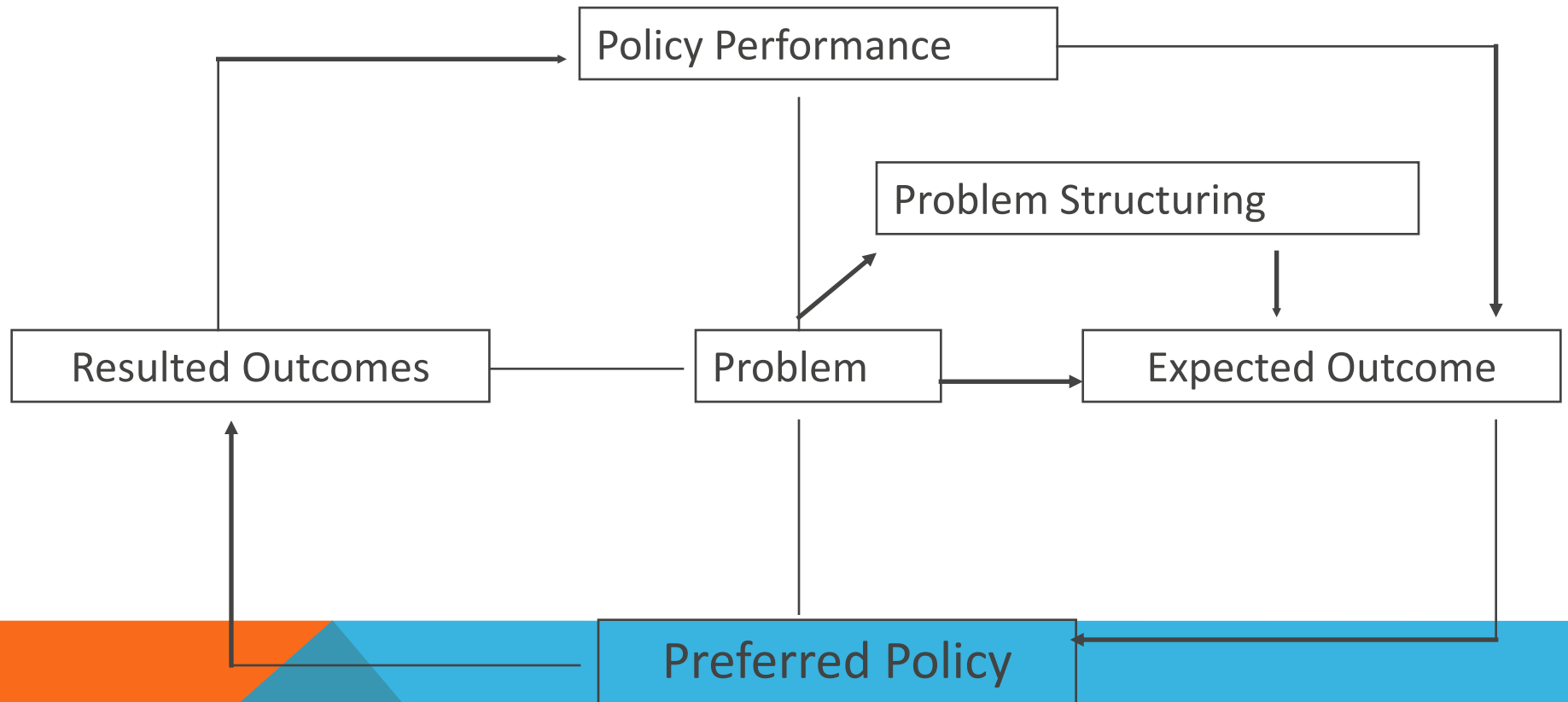
- agenda setting (problem recognition);
- policy formulation (proposal of a solution);
- decision-making (choice of a solution);
- policy implementation (putting the solution into effect);
- policy evaluation (monitoring results).

(Howlett and Ramesh, 2003)

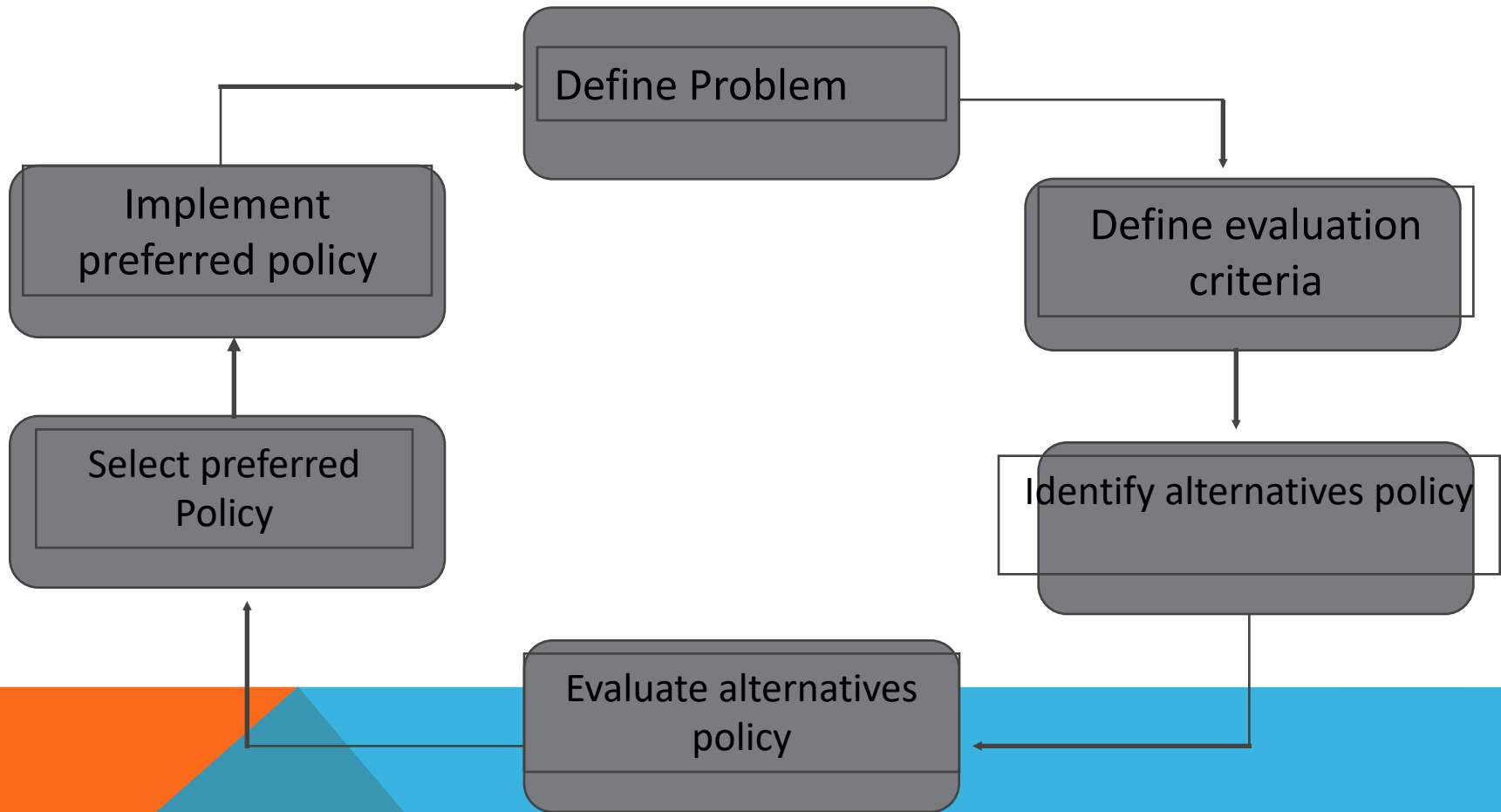
SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK



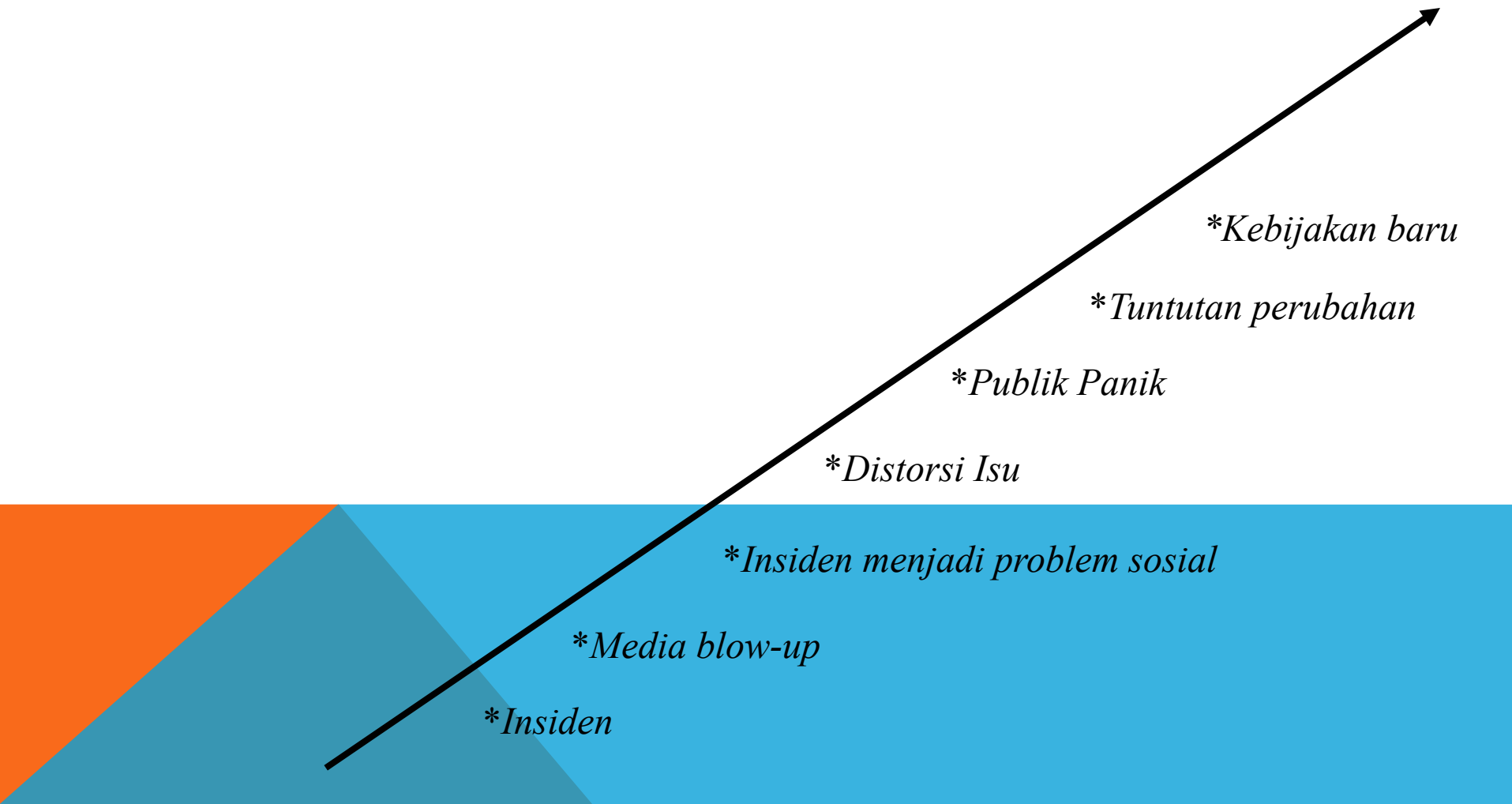
POLICY PROCESS (DUNN, 1996)



POLICY PROCESS (PATTON, 1986)



MEDIA, KEPANIKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK



LINGKUNGAN, ISU, AGENDA DAN POLICY

Kebijakan publik dibentuk oleh adanya isu/problem yang muncul dari lingkungan implementasi kebijakan

Isu dan fakta yang sama dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi, tergantung dari persepsi, nilai, kepercayaan, kepentingan dan pengetahuan tentang realitas

Problem atas suatu isu biasanya tidak terstruktur dan bervariasi, tergantung bagaimana kita melihat isu

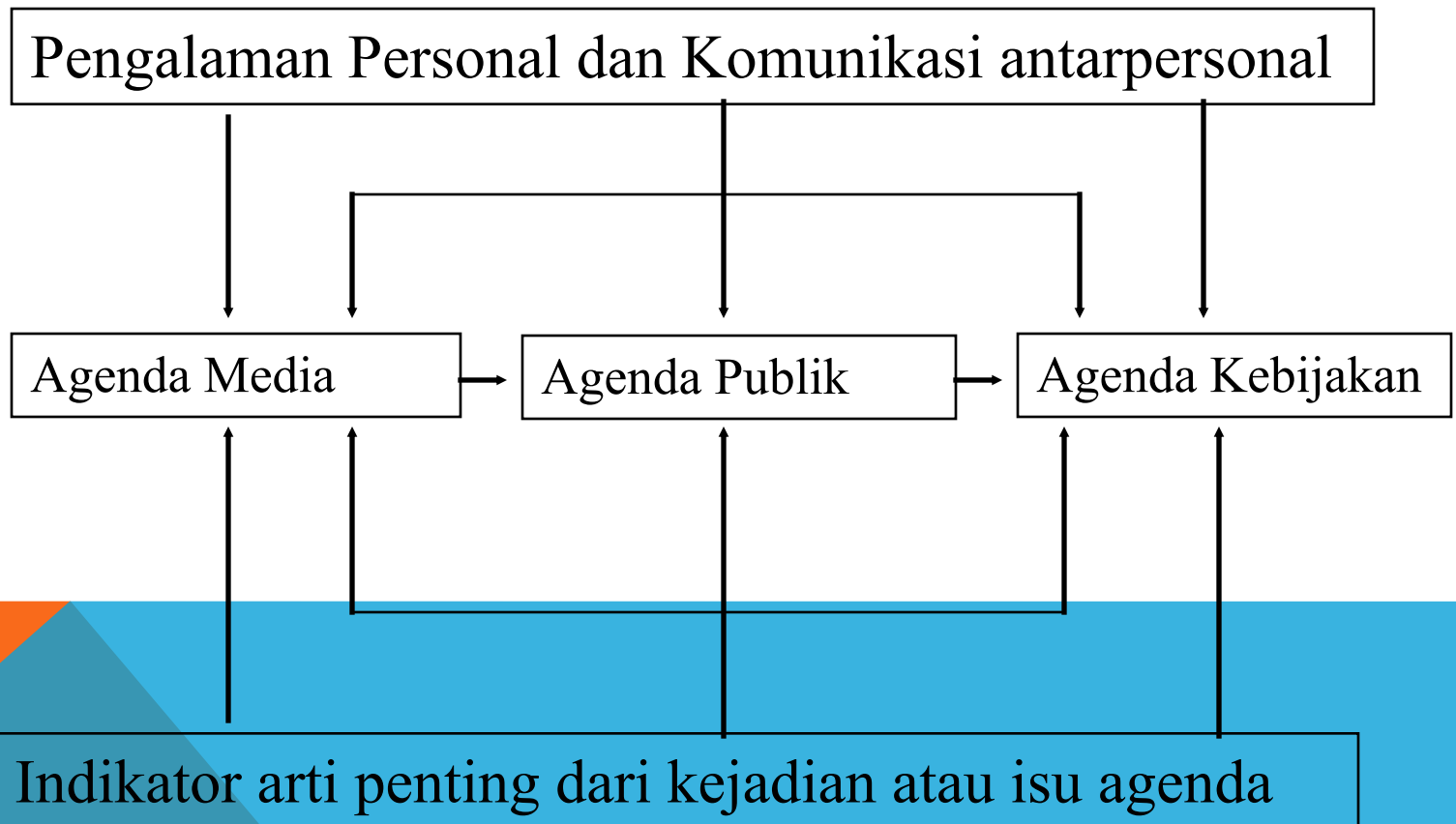
OPINI PUBLIK DAN KEBIJAKAN

Sebagian besar dari kebijakan publik muncul dari adanya opini publik (*public opinion*)

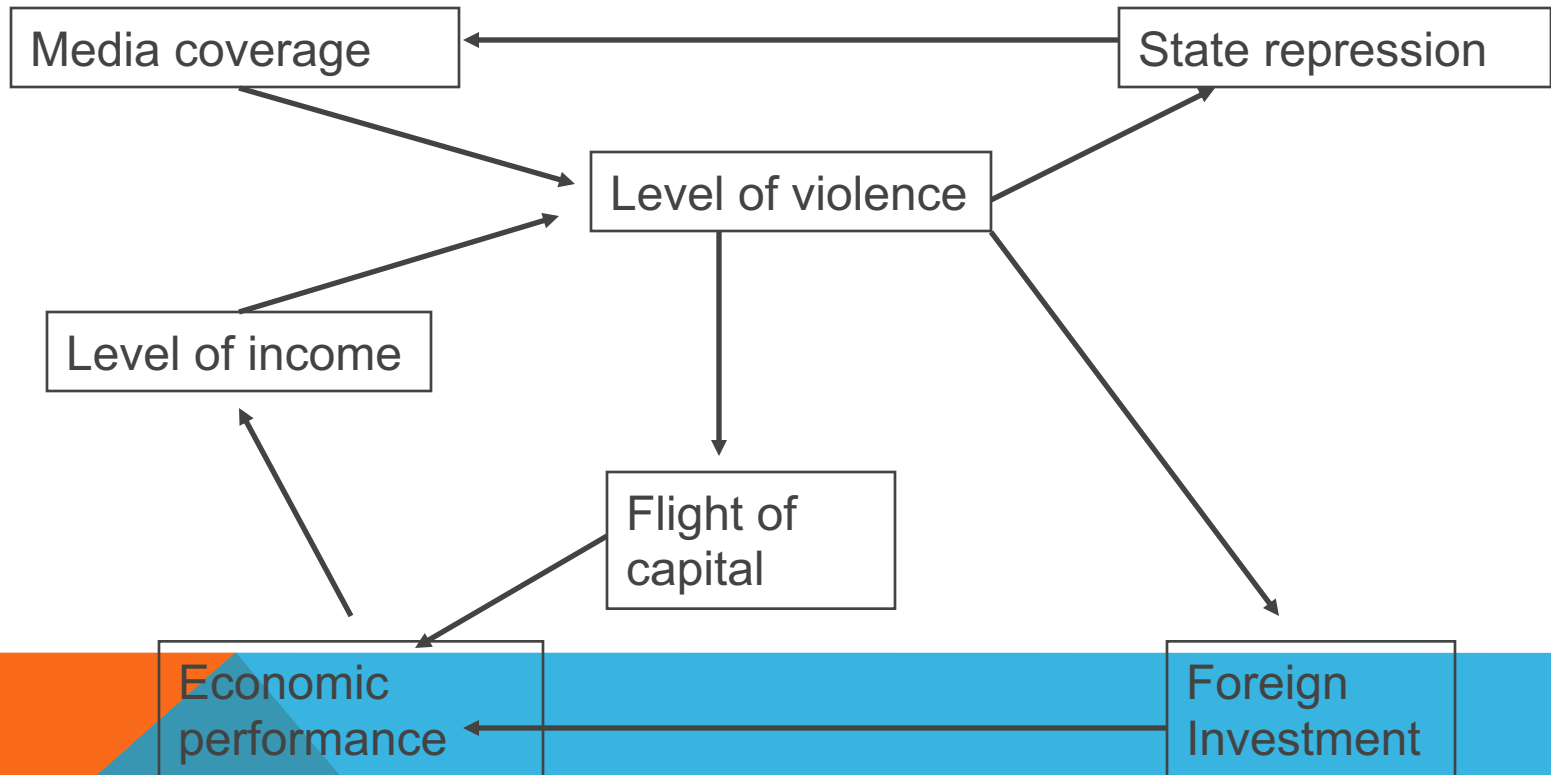
Opini publik lazimnya diangkat oleh media dan pengalaman yang terus menerus dari masyarakat terhadap suatu isu



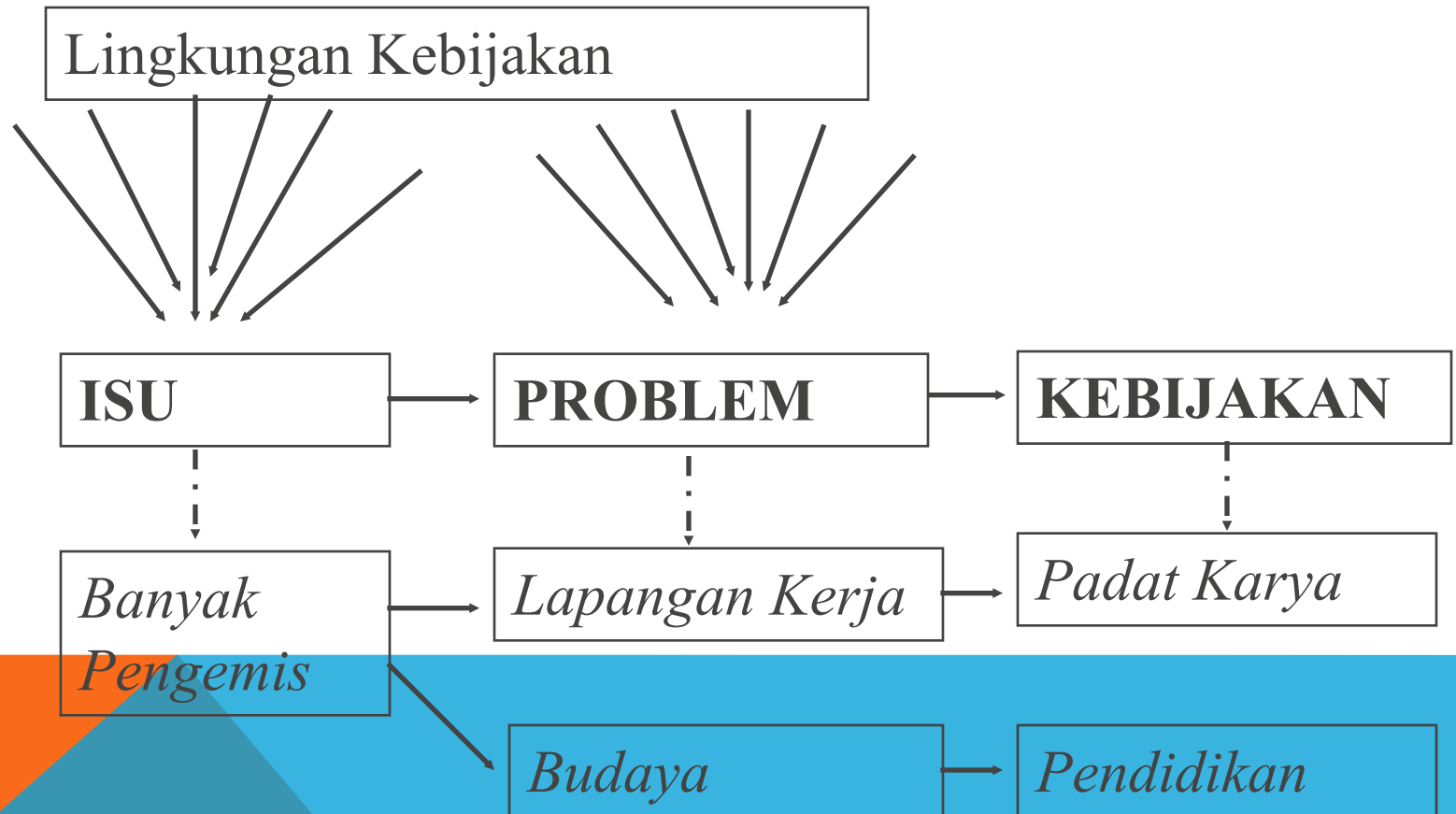
OPINI PUBLIK DAN AGENDA PUBLIK



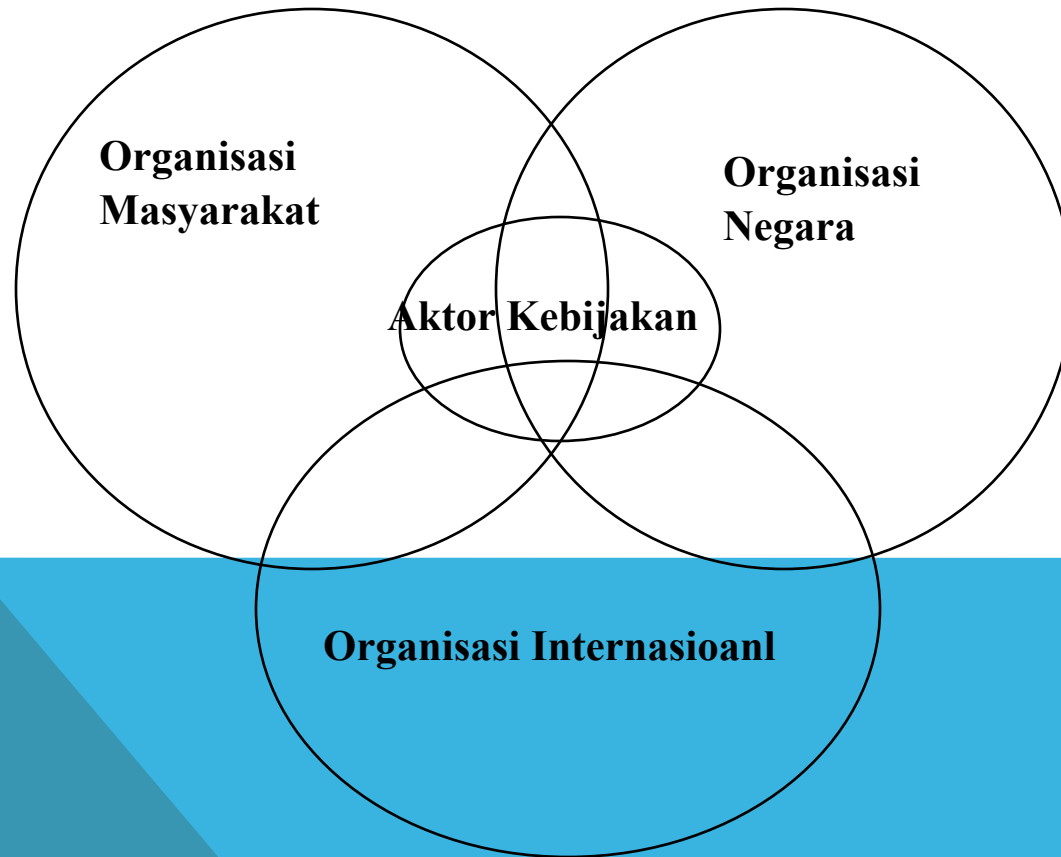
STRUKTURISASI MASALAH



ANALISIS ATAS DEFINISI ISU



AKTOR DAN INSTITUSI DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK



PARTISIPAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

The interaction view recognizes that *policy is an ongoing process with many participants*, most of whom do not have a formal or recognized role in policymaking.

They include ministers of state, their advisers, politicians, public servants, party members, 'street level' delivery staff, interested members of the public, the media and academics.

According to this view, policy is not about the promulgation of formal statements but *the processes of negotiation and influence*;

KEPADA SIAPA KEBIJAKAN DITUJUKAN ?

Pemerintah itu sendiri (state agencies)

Masyarakat (civil society)

Lembaga privat-profit (perusahaan, Bank)

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)

Media

Hubungan lembaga publik dan privat

Interaksi antar individu dalam sektor privat

